

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

### **Buku:**

Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Cetakan ke-10). Depok: Rajawali Pers, 2021.

Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek* (Cetakan ke-VI). Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.

Ginting, Elyta Ras. *Hukum Kepailitan Buku Ketiga: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Edisi Kedua, Cetak ke-1). Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Cetak ke-17). Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum* (Edisi Revisi, Cetak ke-4). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

\_\_\_\_\_. *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Cetak ke-11). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan* (Edisi Revisi). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya* (Jilid 1 dan 2, Cetak ke-1). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum* (Cetak ke-8). Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan* (Edisi Pertama, Cetak ke-6). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan* (Cetak ke-IV). Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2010.

\_\_\_\_\_. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran* (Edisi Kedua). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Subekti. *Pokok – Pokok Hukum Perdata* (Cetak ke-XXVI). Jakarta: PT Intermedia, 2017.

Suyuthi, Wildan. *Sita dan Eksekusi: Praktek Kejurusitaan Pengadilan*. Jakarta: PT Tatanusa, 2004.

### **Bahan Ajar:**

Mandiana, Sari. *Hand Out Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya, 2020.

### **Jurnal Online:**

Dandel, Daniello Chris Lawalata. *Penyitaan Harta Benda Hasil Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*. Jurnal *Lex Crimen*, Vol. VII, No. 10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/22681/22378>, 2018 (diakses pada 7 Agustus 2021 pukul 16.54 WIB).

Nola, Luthvi Febryka. *Kedudukan Sita Umum Terhadap Sita Lainnya Dalam Proses Kepailitan*. Jurnal *Negara Hukum*, Vol. 9, No.2. <http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v9i2.1047>, 2018 (diakses pada 6 Agustus 2021 pukul 22.30 WIB).

Nugroho, J. F. dan Susanti Adi Nugroho. *Kedudukan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Kepailitan*. Jurnal *Hukum Adigama*, Vol.1, No.1. <http://dx.doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2148>, 2018 (diakses pada 16 Juni 2021 pukul 23.38 WIB).

### **Putusan Pengadilan:**

Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga Jkt.Pst.

